Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi

Silvia Engrain¹, Abdul Sadad²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: silvia.engraini6522@student.unri.ac.id¹, abdul.sadad@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi. *Good environmental governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut ditekankan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori menurut Addahlawi et al., (2019) dikutip dari Belbase, yang mencakup tujuh indikator utama yaitu aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi, dan akses untuk memperoleh keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di Taman Jalur belum memiliki aturan yang jelas dan masih mengacu pada peraturan bupati yang bersifat umum. Selain itu, faktor penghambat seperti minimnya edukasi lingkungan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih rendah, disebabkan adanya fasilitas pendukung yang terbatas dan penempatan tempat sampah yang belum strategis di sekitar area taman jalur. Oleh karena itu, perlunya upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, serta edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi dan perbaikan kebijakan, diharapkan pengelolaan sampah di Taman Jalur dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: *Good Environmental Governance (GEG), Pengelolaan Sampah, Taman Jalur.*

Abstract

This study aims to determine Good Environmental Governance in Waste Management in Taman Jalur, Kuantan Singingi Regency. Good environmental governance is a manifestation of the government and local government in supporting the creation of a good environment and to realize the implementation of sustainable development. This principle is emphasized for the implementation of environmental protection. This study uses a qualitative method with a theoretical approach according to Addahlawi et al., (2019) quoted from Belbase, which includes seven main indicators, namely the rule of law, participation and representation, access to information, transparency and accountability, decentralization, institutions and institutions, and access to justice. The results of the study indicate that good environmental governance in waste management in Taman Jalur does not yet have clear rules and still refers to general regent regulations. In addition, inhibiting factors such as minimal environmental education, lack of public awareness in disposing of waste in its place are still low, due to limited supporting facilities and the placement of trash bins that are not yet strategic around the Taman Jalur area. Therefore, it is necessary to increase cooperation between the government, the Environmental Service and the community, as well as more intensive education to increase awareness of the importance of the active role of the community in maintaining the environment in a sustainable manner. Through collaboration and policy improvements, it is hoped that waste management in Taman Jalur can run more effectively and sustainably. This research is expected to be useful for government agencies, academics, and the community in order to improve environmental quality in waste management.

Keywords: *Good Environmental Governance (GEG), Waste Management, Path Park.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan menjadi suatu masalah yang sangat krusial dan tidak ada habisnya di Indonesia. Padahal, kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita, khususnya dibidang kesehatan. Lingkungan mengalami degradasi akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengedepankan prinsip kelestarian ekologis. Pendegradasian lingkungan merupakan masalah yang sedang dihadapi umat manusia. Masalah ini terjadi baik di dalam negeri maupun global dapat mengancam *biosustainability* di masa depan. Indonesia adalah negara berkembang terpadat ke empat di dunia, tingginya angka kemiskinan di Indonesia juga memperburuk kondisi lingkungan masyarakat yang ditandai dengan maraknya permukiman kumuh disertai dengan kondisi sanitasi yang buruk, sehingga dalam situasi tersebut, kebutuhan akan tanah (permukiman) serta air bersih menjadi tinggi. Keadaan-keadaan seperti inilah yang pada akhirnya melatarbelakangi salah satu masalah kerusakan lingkungan hidup yang sampai hari ini masih menjadi sebuah dilema masyarakat perkotaan bahkan pedesaan di Indonesia, yaitu masalah pengelolaan sampah.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan yang berkelanjutan dan sudah lama terjadi di karenakan ada atau tidaknya campur tangan manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

- 1) Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam, bentuk bencana alam yang menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup.
- 2) Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia.

Faktor manusia diartikan sebagai tingkat kepadatan penduduk dan jenis kegiatan yang dilakukan berdampak terhadap lingkungan. Seperti pesatnya pertumbuhan penduduk dan angka konsumsi terhadap barang yang tinggi akan menimbulkan permasalahan, salah satunya yaitu masalah persampahan. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Hubungan manusia dengan lingkungan yang saat ini terjadi yaitu selalu berkaitan dengan timbulnya kerusakan lingkungan, namun disamping itu, adanya prinsip dimana dapat dilakukan pencegahan terhadap adanya kerusakan lingkungan. Prinsip tersebut dinamakan prinsip *good environmental governance*. *Good environmental governance* merupakan perwujudan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan hidup baik dan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip tersebut ditekankan untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dengan adanya prinsip tersebut menimbulkan suatu tindakan baik dari pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama melakukan perlindungan terhadap lingkungan, salah satunya dengan menjaga keindahan lingkungan dari pencemaran sampah. Prinsip *good environmental governance* diperlukan dalam pengelolaan sampah karena dampak negatif dikhawatirkan akan terjadi apabila metode dan teknik pengelolaan sampah tidak berwawasan lingkungan, seperti contohnya penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak bagi kesehatan masyarakat. Apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat maka pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien.

Untuk menerapkan salah satu prinsip tata kelola yang baik terkait dengan komitmen perlindungan lingkungan, lahir konsep baru pengelolaan lingkungan, yaitu tata kelola lingkungan (*Good Environmental Governance*). Tata kelola lingkungan merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup, yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Selain itu, konsep tata kelola lingkungan harus membawa aspek ekologi dan ekonomi ke dalam arus utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan lingkungan yang baik (*good environmental governance*) merupakan indikator penting keberhasilan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Di dalam UUPPLH telah diatur mengenai asas dimana lebih spesifik dalam Pasal 2 (dua) huruf menyatakan bahwa: "Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut mumpuni dalam (Andriadi 2023) terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola *governance*.

Kota Taluk Kuantan sebagai Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi untuk mengembangkan taman kota yang dapat memberikan manfaat bagi penduduk setempat. Taman Jalur memiliki luas 5.100 m². Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Kota Teluk Kuantan merupakan Ibukota Kabupaten Kauntan Singingi yang menjadi pusat administratif dari Kabupaten Kuantan Singingi. Kota Teluk Kuantan juga merupakan ibukota kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah. Taman jalur menjadi tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi terutama bagi wisatawan yang datang dari luar Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu daya tarik utama taman ini adalah air mancur yang memberikan elemen air yang menenangkan dan memperindah suasana. Taman jalur rame dikunjungi apabila pada sore hari hingga malam hari, tidak hanya para muda-mudi yang datang ke taman jalur tetapi orang yang berkeluarga juga kerap kali membawa anak-anak untuk berjalan, bermain karena taman jalur menjadi tempat kuliner dan juga tersedia tempat wahana permainan anak-anak. Selain itu, taman jalur ini berfungsi sebagai tempat berbagai acara budaya dan atraksi wisata, termasuk festival pacu jalur, penggelaran seni, dan pameran produk lokal. Taman jalur ini digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk rekreasi, pendidikan, dan pelestarian budaya.

Perbedaan taman jalur dengan taman lainnya yang ada di Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu taman jalur terletak di pusat kota Teluk Kuantan, disana terdapat gapura selamat datang yang sangat mega dan sebuah tugu lancung kuning yang merupakan lambing Provinsi Riau, taman jalur ini terletak di tepi Sungai Kuantan tepatnya di arena event pacu jalur yang dinamakan tepian narosa. Tepian narosa ini adalah tempat digelarnya event pacu jalur yang merupakan tradisi tahunan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kuantan Singingi, pada saat event pacu jalur dilaksanakan banyak pengunjung yang datang untuk menyaksikan even pacu jalur, tidak hanya pengunjung dari dalam dan luar Kuantan Singingi untuk berjalan, ini menyebabkan sampah berserakan di taman jalur.

Taman jalur selalu ramai dikunjungi apalagi pada sore hingga malam hari, tidak hanya para muda-mudi tetapi mereka yang berkeluarga juga kerap kali membawa anak-anaknya untuk berjalan dan bermain karena di taman jalur ini juga tersedia wahana permainan untuk anak-anak. Sedangkan taman yang lain di area Teluk Kuantan berbanding terbalik dengan taman jalur, taman yang lain tidak memiliki tempat kulineran, jauh dari pusat kota, tidak ada wahana permainan untuk anak-anak, dan pengunjungpun tidak begitu ramai.

Kabupaten Kuantan Singingi berkomitmen untuk mencapai visi "Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju, Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH) di Provinsi Riau Tahun 2026". Visi ini mencerminkan keinginan untuk menggabungkan kemajuan ekonomi, pelestarian budaya, serta kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan. Sedangkan misi yang diusung adalah "Terwujudnya pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan". Namun, kenyataannya saat ini terdapat ketidaksesuaian antara visi dan misi dengan kenyataannya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dalam hal pengelolaan sampah di Taman Jalur. Pengelolaan sampah di Taman Jalur, sebagai salah satu representasi ruang publik, masih menghadapi berbagai masalah, seperti tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menurunkan kualitas estetika serta kesehatan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan dalam infrastruktur yang berkelanjutan serta pengelolaan lingkungan yang efektif. Pengelolaan sampah

yang baik adalah salah satu aspek penting dari *Good Environmental Governance* yang mendukung visi dan misi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam pengelolaan sampah di taman jalur melalui dinas-dinas terkait. Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan taman jalur direncanakan, dikelola dan dipelihara dengan baik serta berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kolaborasi dengan masyarakat dan pihak swasta yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan taman jalur. Salah satu pihak yang bertanggungjawab atas *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Dalam mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, maka tidak akan terlepas kaitannya dengan masalah sampah yang dari hari ke hari semakin menumpuk. Makin menumpuknya volume sampah tersebut karena adanya penambahan penduduk yang semakin meningkat dan disertai dengan adanya aktivitas manusia yang semakin berkembang dan pembangunan yang dilakukan juga terus meningkat. Sehingga sisa atau bekas makanan dan sisa barang industri yang biasa kita kenal sebagai sampah akan bertambah pula. Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Tetapi sering kali kita mendengar banyak permasalahan sampah yang ditimbulkan, yaitu mulai dari proses penanganan sampah yang berasal dari masyarakat, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah. Sehingga sampah perlu ditanggulangi secara serius, karena bila tidak sampah dapat menimbulkan masalah seperti pencemaran lingkungan, sarang penyakit, kerusakan alam yang diakibatkan oleh sampah plastik.

Kondisi pewardahan sampah yang masih menggunakan jenis tong sampah yang tidak terpisah antara sampah organik dan anorganik sehingga sampah tersebut bercampur baur dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, dan menjadi bahan penularan penyakit bagi manusia seperti lalat, nyamuk, tikus, dan kecoak. Selain itu dapat menurunkan kualitas lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sumber air.

Minimnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengingat yang semakin hari jumlah penduduk semakin bertambah, maka dari itu masyarakat ataupun pengunjung yang ada di Taman Jalur sulit untuk menemukan tempat pembuangan sampah terdekat di sekitarnya, sehingga terjadi pembuangan sampah disembarang tempat. Selain itu juga keterlambatan jadwal pengambilan sampah membuat volume sampah semakin menumpuk yang menyebabkan pencemaran lingkungan, dan keterbatasan jumlah armada yang ada membuat terlambatnya jumlah pengangkutan sampah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan di Taman Jalur Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini menjadi objek penelitian karena di Taman Jalur Kota Taluk Kuantan ini menjadi tempat wisata kuliner di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga aktif di setiap hari dan apalagi di setiap ajang festival pacu jalur dan dihari-hari libur. Sampah di Taman Jalur ini belum mendapatkan penanganan yang baik dilihat dari perencanaan, pengelolaan sampah belum menjalankan tugasnya secara maksimal. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini yaitu Bapak Hardiman, S.ST., MT (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kuantan Singingi), Bapak Aditya Wahyu Prakasa (Staff Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kuantan Singingi), Bapak Wawan dan Bapak Risky (Pedagang Taman Jalur), serta Kakak Novita Sari, dan Ismawati (Pengunjung Taman Jalur). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi

Penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi dianalisis menggunakan teori Addahlawi et al., (2019) dikutip dari Belbase, sebagai berikut:

Aturan hukum (*rule of law*) adalah kerangka aturan hukum atau perundang-undangan haruslah bersifat keadilan ditegakkan dan dipatuhi. Pengelolaan sampah di Taman Jalur telah diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, undang-undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pengelolaan sampah di Indonesia. UU ini mengatur aspek-aspek seperti pengurangan sampah, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, serta tempat akhir untuk membuang sampah. Hal ini juga mendorong penggunaan konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan ini mengatur secara spesifik terdapat pada pasal 23. Peraturan ini mencakup persyaratan rincian tugas seksi pengelolaan pertamanan. Dalam pengelolaan sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan, dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup terkait aturan hukum dalam pengelolaan sampah di taman jalur, yaitu sebagai berikut:

“Khusus di Taman Jalur belum ada, khusus saat ini kami masih merujuk pada peraturan bupati yang bersifat umum. Namun, Taman Jalur membutuhkan perhatian khusus karena merupakan area publik yang sering dikunjungi masyarakat. Jika ada aturan spesifik, kita dapat lebih efektif dalam pengelolaan sampah”. (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Partisipasi adalah keterlibatan komponen *governance* dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indra dengan menggunakan bahasa sendiri. Partisipasi merupakan proses ketika masyarakat, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah, yaitu:

“Kami Dinas Lingkungan Hidup berharap pengunjung tidak membuang sampah sembarangan dan kami sudah memberikan wadah penampungan sampah serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan lingkungan.” (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Akses terhadap informasi merupakan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana mekanisme informasi lingkungan oleh pemegang kewenangan. Akses informasi ini adalah melakukan pertemuan antara masyarakat dengan pemerintah daerah mengenai permasalahan sampah yang terjadi. Sehingga dengan adanya akses informasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi terkini terkait kondisi sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3, yaitu:

“Kami memberikan informasi dengan mengirim surat kepada Kepala Desa (Kades) serta langsung disampaikan kepada pedagang taman jalur atau melalui PPTJ WhatsApp grup.” (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya dilapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Transparansi

bertujuan untuk membangun kepercayaan dengan memastikan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui apa yang terjadi dalam suatu organisasi atau sistem. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan aturan, etika, dan tujuan organisasi. Maksud tujuan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan sampah khususnya di taman jalur. Sesuai wawancara dengan informan pengunjung yang ada di taman jalur terkait transparansi pengelolaan sampah, yaitu:

"Selama ini, informasi yang diberikan cukup jelas, misalnya tentang kewajiban kami membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tapi, kami belum tahu secara detail soal alur pengelolaan sampah, seperti ke mana sampah dibawa setelah diangkut." (Wawancara bersama Novita Sari selaku Pengunjung Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 02 Januari 2025).

Desentralisasi adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai aspek, seperti keuangan, kebijakan, serta penyelenggaraan layanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk desentralisasi dapat berupa desentralisasi politik, administratif, fiskal, dan ekonomi. Berikut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3, yaitu:

"Kami Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan sampah di Taman Jalur. Kami melibatkan masyarakat, serta Persatuan Pedagang Taman Jalur (PPTJ), untuk mendukung pengelolaan sampah." (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Lembaga dan institusi adalah organisasi pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu lembaga pemerintah merupakan lembaga yang mengelola sampah. Sedangkan lembaga masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat yang di ikutsertakan pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah. Adapun hasil wawancara dengan Staff Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 terkait bentuk kolaborasi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, yaitu:

"Kami Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pedagang yang ada di taman jalur, jika mereka sewa tempat atau sewa lapak harus menyediakan tempat sampah. Kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menyelenggarakan kampanye edukasi tentang lingkungan". (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Akses hukum berarti tidak hanya sehubungan dengan ketersediaan layanan peradilan, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan penggunaan layanan peradilan. Penerapan prinsip ini mengacu pada manfaat yang lebih langsung dan tidak langsung yang memiliki efek positif pada penerapan aturan atau pedoman yang ada, karena semua orang di Kabupaten Kuantan Singingi dapat merasakan adanya keadilan yang sama. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam artian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu bentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar dan sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*) yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan atas kelangsungan persediaan air tanah, pasokan air tanah yang berkelanjutan, konservasi fungsi lingkungan, dan semua konten flora dan fauna yang ada keanekaragaman hayati. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi terkait akses keadilan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

"Kami berupaya memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak. Misalnya, pedagang di Taman Jalur diwajibkan menyediakan tempat sampah. Jika ada pelanggaran, kami lakukan teguran secara bertahap, tanpa membedakan pedagang kecil atau besar. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan langsung jika ada ketidakadilan atau masalah pengelolaan

sampah di area ini". (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

Faktor Penghambat *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi

Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum tertatanya petugas kebersihan dengan baik dan belum mampu untuk mentaati peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pengelolaan sampah di taman jalur. Faktor penghambat ini yang menyebabkan pengelolaan sampah di taman jalur masih belum efektif.

Keberhasilan pengelolaan sampah harus bersamaan dengan kemampuan beban kerja yang belum merata terhadap petugas kebersihan di bidang persampahan. Permasalahan sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi belum terselesaikan dari tahun ke tahun, volume sampah di Taman Jalur masih sangat tinggi dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan peringatan tentang larangan buang sampah telah di pasang pada kawasan Taman Jalur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan bahwa jika setiap Pedagang yang sewa lapak atau sewa tempat di Taman Jalur harus menyediakan tempat sampah masing-masing. Kemampuan beban kerja yang belum merata terhadap petugas kebersihan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 sebagai berikut:

"Belum tertatanya pembagian kerja terhadap sumber daya manusia yang ada menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan. Program-program yang dibuat tidak akan efektif jika pembagian kerja terhadap sumber daya manusia karena beban kerja yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang ada. Ini juga menjadi faktor penghambat karena petugas kebersihan belum tertata dengan baik dapat menyebabkan keterlambatan dalam mengatasi sampah." (Wawancara Aditya Wahyu Prakasa, ST selaku staff Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 November 2025).

Sarana dan prasarana menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah tanpa fasilitas yang mencukupi. Pengelolaan sampah tidak bisa dijalankan secara maksimal, itulah yang terjadi di taman jalur Kabupaten Kuantan Singing. Taman jalur ini hanya memiliki 10 tempat sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup, tetapi kenyataannya hanya tersisa 3 tempat sampah yang tersisa, hal ini yang menyebabkan sampah berserakan di area taman jalur serta menyebabkan timbulnya bau busuk dan membawa penyakit. Kebersihan dan keindahan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan:

"Seperti yang kita lihat banyaknya sampah yang berserakan yang di buang sembarangan di sekitar area taman jalur karena tempat sampah yang ada sudah penuh sehingga tidak ada tempat pembuangan sampah lagi, dan juga keterbatasan anggaran untuk membangun lebih banyak tempat sampah dan TPS di taman jalur. Serta minimnya infrastruktur, sarana dan prasaranan mengakibatkan pengelolan sampah di taman jalur belum baik." (Wawancara dengan Bapak Aditya Wahyu Prakasa, ST selaku Staff Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi).

Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di taman jalur. Banyak pengunjung yang memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, yang sering kali terlihat dari tindakan membuang sampah sembarangan dan sering terdapat kehilangan tempat sampah yang ada. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 sebagai berikut:

"Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan taman jalur sangat menghambat upaya kami. Meskipun kami sebagai DLH sudah melakukan pemberitahuan dengan memasang spanduk, atau melalui sosial media terkait larangan membuang

sampah sembarangan dan merusak fasilitas yang ada di taman jalur, masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas yang ada di taman jalur seperti hilangnya tempat sampah sehingga membuat banyaknya sampah yang berserakan". (Wawancara dengan Bapak Hardiman, S. ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan & Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 09 November 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, *Good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di taman jalur Kabupaten Kuantan Singingi ini belum berjalan dengan maksimal, maka dapat disimpulkan bahwa Aturan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi belum baik dan masih mengacu pada aturan bupati yang bersifat umum. Kedua partisipasi dan representasi, terhadap pengelolaan sampah masih terdapat kekurangan dalam menyediakan tempat sampah. Ketiga akses terhadap informasi, Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan dengan baik terhadap pengelolaan sampah di taman jalur kepada pedagang maupun masyarakat atau pengunjung. Keempat transparansi dan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di taman jalur. Kelima desentralisasi, Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan kewenangan dalam melibatkan pedagang dalam pengelolaan sampah di taman jalur. Keenam lembaga dan institusi, Dinas Lingkungan Hidup sudah bekerjasama dengan pedagang yang ada di taman jalur. Terakhir akses untuk memperoleh keadilan, kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah di sekitar area taman jalur. Faktor penghambat yang ditemukan dalam *good environmental governance* dalam pengelolaan sampah di taman jalur Kabupaten Kuantan Singingi, Kedua kurangnya sarana dan prasarana di taman jalur membuat pengelolaan sampah di taman jalur tidak optimal. Ketiga kurangnya partisipasi masyarakat, pengunjung dalam menjaga dan melestarikan lingkungan taman jalur sehingga membuat banyaknya sampah berserakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, K. L., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2019). *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia*. JGG- jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, 8(2).
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). *Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia*. Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan, Vol 8(2), hlm. 106-118.
- Alfrinardi, A. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Pengelolaan Sampah Dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 2(1), hlm. 202-206.
- Belbase, Narayan, (2010). *Good Environmental Governance In The Future Constitution*, Nepal: IUCN.
- Cresswell, J.W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hayat dan Hasan Zayadi. (2018). "Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga", *Jurnal Ketahanan Pangan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 136.
- Hertifa Sj. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Juwandi, Ronni. (2022). *Kebijakan Publik Partisipatif (Kebijakan Publik Partisipatif: Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Dalam Perspektif Good Governance)*. Amerika Media
- Juwandi, R, & Taufan, M. A (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan *Good Governance*. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7(2), hlm. 2365-2379.
- Kartika, C. F., Hanafi, I., & Hermawan, S. (2012). *Good Environmental Governance*. Universitas Brawijaya Press.

- Mumpuni, N. W. R., & Kusumawati, M. P. (2021). *Good governance* pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 12(1), hlm. 79-89.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip *Good Governance* Di Indonesia. *E-Govwiyata: Education and Governance*, 1(1), 40-52.
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). *Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43-56.
- Purwanto. (2021). Penegak Hukum Lingkungan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Boyolali Dalam Rangka Mewujudkan Prinsip *Good Environmental Governance*. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(2), 10-11
- Prihatiningtyas, W. (2019). Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*. *Media Luris*, Vol 2(2), hlm. 279. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.14744>
- Rasyid, W. and A. H. (2019). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Parepare*. *Madani Legal Review*, 3(2), 146.
- Redin. (2019). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7(2), hlm. 19-42
- Rianto. (2020). *Teknik Analisis Data*. Dalam Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Edisi ke-3, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriatna, J. (2021). *Pengelolaan lingkungan berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tchnobanoglous. (1993). *Integreted Solid Waste management*, (New York: Mc Graw Hill Inc.
- UNESCAP. (2009). *What is Good Governance*
- W.P. Cunningham, and M. A. Cunningham. (2024). *Principles of Environmental Science*. Second Edition. McGraw-Hill Co., Dubuque, IA,
- Yolanda, V., & Septianda, M. F. (2023). Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, Vol 5(1), hlm. 17-29.
- Yudi, R. dan Cahya, S. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintah dan Perkembangan*. Bandung: CV Alfabeta.